

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Penerapan *Good Governance*

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan yaitu proses, cara, dan perbuatan menerapkan. Beberapa pakar memaparkan pandangannya tentang penerapan yaitu suatu perbuatan yang berasal dari kaidah, sistem, serta situasi lain dalam mendapatkan sasaran khusus dan adanya kebutuhan yang dibutuhkan dari kelompok atau individu.

2.1.1.1 Pengertian *Good Governance*

Adanya pergeseran paradigma dari *government* ke *governance*, hal ini muncul pandangan atau paradigm baru tentang administrasi yang disebut *good governance*. Governansi yang baik diharapkan mampu membantu organisasi dalam meningkatkan kinerjanya termasuk pada sektor publik. Governansi sektor publik ini merupakan sebuah keniscayaan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kapasitas pemerintah untuk menerapkan kebijakan dan program juga akan membangun kepercayaan masyarakat. Tanpa kepercayaan masyarakat, akan sulit bagi pemerintah untuk mendapatkan dukungan pelaku pasar dan dunia usaha, terutama bila dukungan tersebut diperlukan pada kondisi yang sulit dalam jangka pendek atau capaian jangka panjang dalam mewujudkan tujuan pembangunan.

World Bank (2017) dalam KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governansi) (2022:6) mendefinisikan governansi sebagai metode kekuatan (*power*) yang

dijalankan dalam mengelola sumber daya politik, ekonomi, dan sosial untuk mencapai tujuan pembangunan. Oleh sebab itu, governansi sektor publik mencakup manajemen sektor publik yang efisien, efektif, ekonomis, akuntabel, pertukaran dan arus informasi yang terbuka (transparan), serta pembangunan yang mematuhi kerangka hukum (keadilan serta penghormatan terhadap kebebasan dan Hak Asasi Manusia).

Pemerintahan yang bersih bukanlah suatu konsep, oleh karena itu tidak ada ukuran normatif suatu pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang taat hukum (Hadjon *et al*, 1994:7). Pemerintahan seperti ini disebut dengan *Good Governance*. Pemerintahan yang bersih terkait erat dengan akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya.

Secara konseptual “*good*” dalam bahasa Indonesia “baik” dan “*governance*” adalah “kepemerintahan”. Sedarmayanti (2013:274) mengemukakan arti *good* dalam *good governance* mengandung dua arti yaitu sebagai berikut:

1. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan keadilan social.
2. Aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan tersebut.

Orientasi pembangunan sektor publik adalah menciptakan *good governance* di mana pengertian dasarnya adalah pemerintahan yang baik. Kondisi ini berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsi demokras efisiensi,

pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrative (Mardiasmo, 2018:114)

Harahap (2018:36) mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintah Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain Negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*). Lembaga Administrasi Negara pada tataran ini, *good governance* berorientasi pada 2 (dua) hal pokok, yaitu:

1. Orientasi ideal Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Pada tatanan ini, *good governance* mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituenya, seperti *legitimacy*, *accountability*, dan *assurance of civilian control*.
2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Dalam konteks ini, *good governance* tergantung pada sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Good governance menghendaki pemerintahan agar dapat dijalankan dengan mengikuti prinsip pengelolaan yang baik sehingga sumber daya Negara yang ada dalam pemerintah dapat mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan Negara.

Good governance menurut UNDP yaitu hubungan yang dapat menghasilkan pengeluaran yang baik dan besar di antara Negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). Governance memiliki tiga kaki (*three legs*), yaitu:

1. *Political governance* mengacu pada proses-proses pembuatan keputusan kebijakan (*policy/strategy formulation*), luasnya kewenangan dan legitimasi yang didapat dari proses politik yang demokratis
2. *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan dibidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup.
3. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan. Pelayanan publik yang efisien dan akuntabel oleh birokrasi yang kompeten untuk mendesain dan megimplementasikan program, serta pengelolaan kepentingan publik.

2.1.1.2 Karakteristik *Good Governance*

Good governance dilandasi prinsip dasar antara konsep pemerintahan menggunakan pola pemerintahan tradisional berupa tuntutan kuat supaya peran pemerintah dikurangi sedangkan peran rakyat (dunia usaha maupun lembaga non pemerintah) ditingkatkan serta bertambah luas aksesnya.

UNDP (*United Nations Development Program*) dalam Rohadatul Aisy (2022) Karakteristik serta prinsip pada pemerintahan yang baik, yaitu:

- a. Partispasi (*Paricipation*), setiap penduduk atau kelompok mempunyai kebebasan bersuara sama rata untuk mekanisme pemungutan ketentuan, baik secara terang-terangan atau tidak langsung sesuai kepentingan setiap bagian.
- b. Aturan Hukum (*Rule Of Law*), bentuk dasar asas harus seimbang, dilaksanakan, serta dipatuhi keseluruhan, apalagi hukum mengenai hak asasi manusia.

- c. Transparansi (*Tranparency*), keterbukaan wajib diterapkan dalam bentuk hak berpendapat mengenai informasi.
- d. Daya tanggap (*Responsivness*), setiap lembaga dan prosedurnya ditujukan dengan cara menanggapi semua bagian yang memiliki kepentingan.
- e. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*), pemerintah menjalankan tugas dengan tepat serta berperan menjadi jembatan dalam beragam kebutuhan untuk mencapai kesepakatan atau peluang yang terbaik.
- f. Berkeadilan (*Equity*), lembaga yang baik akan memberi peluang untuk masyarakat dalam usaha memajukan dan melindungi harkat kehidupannya.
- g. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness And Efficiency*), suatu mekanisme aktivitas serta organisasi menciptakan suatu yang sesuai dengan kepentingan dan penggunaan sebaik mungkin dari sumber daya yang tersedia.
- h. Akuntabilitas (*Accountability*), orang yang mengambil ketetapan sektor publik, swasta, serta rakyat memiliki pertanggungjawaban pada publik, sama halnya dengan para pemilik.
- i. Visi Strategis (*Strategic Vision*), pemimpin dan rakyat mempunyai sudut pandang yang berbeda dan pandangan berkelanjutan mengenai pengelolaan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia.

2.1.1.3 Indikator *Good Governance*

Sedarmayanti (2013:289) menjelaskan komponen atau landasan utama yang bisa memberikan ilustrasi administrasi umum dengan mencerminkan pengelola yang telah menerapkan ketentuan:

1. Akuntabilitas

KNKG (2022:12) mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai kewajiban agent (pihak pemegang amanah) untuk melakukan pertanggungjawaban menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada *principal* (pihak pemberi amanah). *Principal* memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Jadi, akuntabilitas publik dapat dilihat sebagai pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah, baik pusat maupun daerah, kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

Ellwood (1993) menyebutkan ada empat dimensi utama akuntabilitas organisasi sektor publik yaitu:

- 1) Akuntabilitas berkaitan dengan supremasi hukum yaitu menyiratkan hukuman atau sanksi terhadap penyalahgunaan sumber daya untuk tujuan selain dari yang telah ditetapkan. Selain itu, akuntabilitas memiliki kaitan yang erat dengan transparansi, karena akuntabilitas tidak dapat dipaksakan tanpa adanya transparansi.
- 2) Akuntabilitas proses adalah akuntabilitas yang berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Realisasi atas akuntabilitas proses adalah pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berbiaya murah.

- 3) Akuntabilitas program adalah bentuk akuntabilitas yang berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak. Akuntabilitas program juga merujuk pada apakah organisasi sektor publik telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
- 4) Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah pada semua level, atas kebijakan-kebijakan yang diambil kepada legislatif dan masyarakat luas. Sumber daya yang dimiliki pemerintah merupakan amanat penting yang diberikan oleh masyarakat sehingga pemerintah wajib untuk mengelola sumber daya tersebut dengan bertanggung jawab untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat luas, serta mampu berakuntabel kepada masyarakat terkait penggunaan dan pengolahan sumber daya tersebut.

Menurut Sedarmayanti (2013:289) akuntabilitas ini mencakup indikator:

- 1) Bertanggung jawab terhadap kelalaian yang dilakukan dalam pelayanan.
- 2) Menjalankan prosedur dan mekanisme kinerja organisasi.
- 3) Petugas pemberi layanan lebih mendahulukan kepentingan masyarakat.

2. Transparansi

Transparansi dalam pemerintahan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada warga negara untuk memberikan akses terhadap informasi yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah dan tujuan-tujuannya yang akan dicapai. Setiap informasi yang telah dipublikasi mengenai kinerja dan kegiatan

pemerintah seperti laporan keuangan rutin, akan memungkinkan publik untuk memberikan penilaian dan evaluasi terhadap pemerintah.

Nilai transparansi ini berhubungan erat dengan supremasi hukum karena memungkinkan masyarakat untuk menilai kesesuaian antara keputusan, tindakan, ataupun transaksi pemerintah dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada.

Menurut Sedarmayanti (2013:289) transparansi mencakup indikator:

- 1) Memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam memberikan aspirasi mengenai pelayanan yang ada di Kecamatan.
- 2) Adanya kemudahan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengakses informasi pelayanan.
- 3) Adanya prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai pada publik.

3. Partisipasi

Partisipasi merupakan prinsip setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan ini dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung (Suhendar, 2016).

Partisipasi dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan publik, dalam mewujudkan kerangka yang cocok bagi partisipasi, perlu dipertimbangkan beberapa aspek, yaitu :

- 1) Partisipasi melalui institusi konstitusional (*Referendum, Voting*) dan jaringan inisiatif asosiasi (*Civil Society*).

- 2) Partisipasi individu dalam proses pengambilan keputusan, *civil society* sebagai *service provider*.
- 3) Lokal kultur pemerintah (misalnya *Neighborhood Service Departement* di USA, atau *Better Management Transparent Budget* di New Zealand).
- 4) Faktor-faktor lainnya, seperti transparansi, substansi proses terbuka dan konsentrasi pada kompetisi.

Menurut Sedarmayanti (2013:289) partisipasi mencakup indikator:

- 1) Setiap kebijakan dalam pelayanan harus berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat, misalnya melalui musyawarah.
- 2) Adanya kritik dan saran dari masyarakat demi mewujudkan kinerja pelayanan yang lebih baik.
- 3) Pelibatan masyarakat untuk bersosialisasi.

4. Supremasi hukum

Supremasi hukum berarti bahwa hukum berada di atas semua orang dan diterapkan secara adil kepada semua orang, baik yang mengatur maupun yang diatur. Supremasi hukum mensyaratkan kerangka hukum yang adil yang ditegakkan oleh peradilan yang independen dan tidak memihak. (KNKG, 2022:11)

Supremasi hukum menyediakan mekanisme *checks and balances* untuk meminimalisir peluang penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah untuk kepentingan pribadi dan golongannya dengan mengorbankan kepentingan publik melalui tindakan sewenang-wenang dan korupsi.

Menurut Sedarmayanti (2013:289) Supremasi hukum mencakup indikator:

- 1) Adanya aturan mengenai kepastian pemberian layanan.
- 2) Adanya standar operasional prosedur bagi pelaksana pelayanan.
- 3) Adanya *reward and punishment* bagi petugas pemberi layanan.

2.1.2 Anggaran Berbasis Kinerja

Mardiasmo (2018:61) menjelaskan, bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang sugdinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Anggaran adalah alat untuk mencegah informasi asimetri dan perilaku disfungsional dari Pemerintah daerah dan merupakan proses akuntabilitas publik. Akuntabilitas melalui anggaran mencakup penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran. Selain itu, anggaran ialah elemen krusial pada sistem pengendalian manajemen sebab anggaran tidak saja menjadi alat perencanaan keuangan, namun juga menjadi alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi. Hal ini yang menyebabkan penelitian di bidang anggaran ada pemerintan daerah menjadi relevan dan penting.

2.1.2.1 Penganggaran Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintah perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial. Anggaran dalam pemerintah disebut dengan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD). Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 APBD adalah suatu rencana keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang

digunakan pemerintah daerah guna melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini berkaitan dengan tujuan pemerintah yaitu mensejahterakan masyarakat secara umum.

Dalam penyusunan APBD yang dikutip dalam Nurmalasari (2008) harus mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat. Maka APBD harus menyajikan informasi yang sangat jelas mengenai tujuan, sasaran dan manfaat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan.

2. Disiplin Anggaran

Dalam disiplin anggaran ini Pendapatan yang direncanakan merupakan suatu perkiraan yang dapat terukur secara rasional agar dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dan belanja yang dianggarkan pada setiap pos merupakan batas tertinggi dari pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran ini didukung oleh kepastian tersedia atau tidaknya penerimaan dengan jumlah yang cukup baik dan tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan atau proyek yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.

3. Keadilan Anggaran

Dalam pengalokasian anggaran ini pemerintah daerah diharuskan adil agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa adanya pembedaan dalam

pemberian pelayanan karena pendapatan daerah diperoleh melalui peran serta masyarakat.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

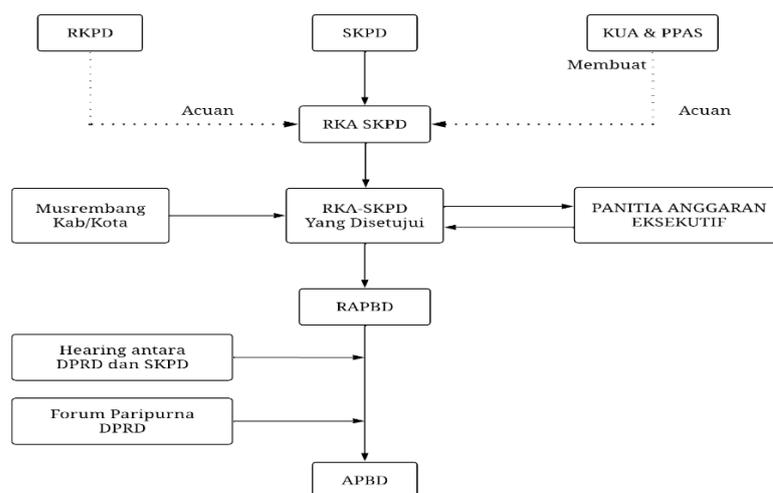
Penyusunan APBD harus dilakukan berdasarkan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat.

5. Disusun dengan Pendekatan Kinerja

Pendekatan kinerja yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang telah ditetapkan.

2.1.2.2 Alur Perencanaan Penganggaran Daerah

Alur perencanaan penganggaran daerah menurut UU No 25 Tahun 2005 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Diagram Alur Perencanaan Penganggaran Daerah

2.1.2.3 Rencana Strategik (Renstra)

Menurut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) Perencanaan Strategik adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala.

Dalam penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja, pemerintah daerah harus mempunyai renstra terlebih dahulu. Karena renstra merupakan analisis dan pengambilan keputusan strategik tentang masa depan organisasi untuk menempatkan dirinya (*positioning*) pada masa yang akan datang. Adapun tahapan dalam melakukan perencanaan strategik yaitu:

1. Merumuskan visi dan misi organisasi
2. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal (*environment scanning*), dengan melihat lingkungan strategik organisasi.
3. Merumuskan tujuan dan sasaran (*goal setting*).
4. Merumuskan strategik-strategik untuk mencapai tujuan dan sasaran.
5. Merumuskan indikator-indikator penting dalam mencapai sasaran tersebut.

2.1.2.4 Rencana Kinerja

Perencanaan merupakan hal yang penting untuk mengefektifkan dan mengefisienkan kinerja pemerintah daerah. Sedangkan perencanaan kinerja merupakan analisis dan proses pengambilan keputusan ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan dimasa yang akan datang. Perencanaan kinerja ini membantu pemerintah untuk mencapai tujuan yang sudah diidentifikasi dalam renstra, termasuk pembuatan target kinerja dengan menggunakan ukuran-ukuran

kinerja. Pengeluaran anggaran dilaksanakan pada setiap SKPD maka kinerja yang dimaksudkan yaitu akan menggambarkan tingkat pencapaian dari pelaksanaan suatu kegiatan, program, dan kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi unit kerja tersebut.

2.1.2.5 Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Muhammad Syam Khusufi (2013:35) menjelaskan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah sistem anggaran yang lebih menekankan pada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal. Sedangkan Mahmudi (2016:158) menjelaskan mengenai pengertian dari anggaran berbasis kinerja yaitu sistem yang mencakup kegiatan penyusunan dan tolak ukur kinerja sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran program.

Performance budgeting (anggaran yang berorientasi kinerja) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi. *Performance budgeting* mengalokasikan sumber daya ke program, bukan ke unit organisasi semata (Bastian Indra, 2001:334).

Anggaran berbasis kinerja disusun untuk membantu pemerintah dalam melakukan koordinasi setiap kegiatan serta mengatasi berbagai kelemahan yang ada pada sistem anggaran, seperti kelemahan yang ditimbulkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam mencapai tujuan serta sasaran pelayanan publik.

Menurut Kepmendagri No. 29 tahun 2001 pengertian anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.
- b. Didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Anggaran dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan.
- c. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan *value of money* dan efektifitas anggaran.
- d. Anggaran kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur (*indicator*) kinerja sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran program.

Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang secara khusus memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan dan sangat menekankan pada konsep *value for money*. Dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja ini maka kinerja suatu instansi pemerintah akan lebih jelas dan terukur hasil dan manfaatnya, karena anggaran berbasis kinerja menuntut kesesuaian dan kejelasan tujuan sasaran anggaran yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan pemerintah (Anggraeni, 2020)

Komponen-komponen visi, misi, dan rencana strategi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian maka penyusunan anggaran berbasis kinerja membutuhkan suatu sistem administrasi public yang sudah ditata dengan baik, konsisten dan juga terstruktur sehingga kinerja anggaran bisa dicapai sesuai ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan. Melalui pengukuran kinerja, manajemen bisa menentukan keberhasilan serta kegagalan suatu unit organisasi dalam pencapaian sasaran dan tujuan untuk selanjutnya yaitu

memberikan penghargaan (*reward*) untuk keberhasilan ataupun hukuman (*punishment*) untuk suatu kegagalan.

2.1.2.6 Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja

Mardiasmo (2018:63) mengemukakan pentingnya anggaran berbasis kinerja bagi pemerintahan karena beberapa alasan yaitu:

- a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choise*), dan *trade offs*.
- c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap masyarakat. Anggaran publik merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

2.1.2.7 Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja

Nordiawan (2010:15) menjelaskan karakteristik dari anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Mengkasifikasikan akun-akun dalam anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitas juga berdasarkan unit organisasi dan rincian belanja.
- 2) Menyelidiki dan mengukur aktifitas guna mendapatkan efisiensi maksimum dan untuk mendapatkan standar biaya.

- 3) Mendasarkan anggaran untuk periode yang akan datang pada biaya per unit standar dikalikan dengan unit aktivitas yang diperkirakan harus dilakukan pada periode tertentu.

Pengklasifikasian dari akun-akun dalam setiap anggaran berdasarkan standar biaya untuk memperoleh efisiensi maksimal yang nantinya anggaran akan disusun berdasarkan pada perkiraan biaya per unit standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang dilakukan dalam periode tersebut.

2.1.2.8 Siklus Anggaran Berbasis Kinerja

Mardiasmo (2018:71) siklus dalam anggaran berbasis kinerja meliputi beberapa tahap diantaranya:

- 1) Tahap Persiapan Anggaran (*Budget Preparation*)

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Maka perlu diperhatikan sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya dilakukan penaksiran pendapatan yang lebih akurat.

- 2) Tahap Ratifikasi (Approval/Ratification)

Pada tahap ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki “*managerial skill*”, “*salesmanship*”, dan “*coalition building*” yang memadai. Karena dalam tahap ini seorang pimpinan harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan dari pihak legislative.

3) Tahap Implementasi (*Implementation*)

Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, maka tahap berikutnya ialah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini yang terpenting harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan pengendalian manajemen. Dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode anggaran berikutnya.

4) Tahap Pelaporan dan Evaluasi (*Reporting & Evaluation*)

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika pada tahap implementasi sudah didukung oleh sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka pada tahap ini tidak akan ditemukan banyak masalah..

2.1.2.9 Proses Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Nordiawan (2010:55), yang diperlukan untuk menyusun anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut:

1) Penetapan Strategi Organisasi (Visi dan Misi)

Visi dan misi ialah cara pandang jauh kedepan serta memberikan suatu gambaran tentang kondisi yang harus dicapai oleh suatu organisasi. Visi dan misi organisasi harus mencerminkan dari apa yang ingin dicapai; memverifikasi arah dan fokus stratego yang jelas; menjadi perekat dan

menyatukan berbagai gagasan strategis; memiliki orientasi masa depan; menumbuhkan seluruh unsur organisasi; menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

2) Tujuan

Tujuan disini adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun atau tujuan operasional. Tujuan operasional harus memiliki beberapa karakteristik yaitu:

- Harus mempresentasikan hasil akhir (*true ends / outcome*) bukannya keluaran (*output*).
- Harus dapat diukur dalam jangka pendek agar dapat dilakukan tindakan koreksi (*corrective action*).
- Harus dapat diukur menentukan apakah hasil akhir (*outcome*) yang diharapkan telah dicapai.
- Harus tepat, artinya tujuan tersebut memberikan peluang kecil untuk menimbulkan interpretasi individu.

3) Penetapan Aktivitas

Aktivitas harus dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional.

4) Evaluasi dan Pengambilan Keputusan

Pada proses ini dilakukan dengan standar baku yang ditetapkan oleh organisasi ataupun dengan memberikan kebebasan pada masing-masing unit untuk membuat kriteria dalam menentukan peringkat.

2.1.2.10 Indikator Anggaran Berbasis Kinerja

Dalam Penyusunan anggaran berbasis kinerja menetapkan ukuran atau indikator keberhasilan sasaran dari fungsi belanja merupakan hal yang sangat penting. Indra Bastian (2001:337) menyebutkan bahwa Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan elemen indikator kinerja.

Penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU/Key Performance Indicators) oleh pemerintah memungkinkan pengukuran perkembangan negara dalam mencapai agenda strategis SDGs. Beberapa dari IKU yang diterapkan juga dapat mengukur dampak dan reformasi pemerintah dalam meningkatkan kapasitas pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan negara (KNKG, 2022:49)

Elemen indikator kinerja menurut Indra Bastian (2001:337) adalah sebagai berikut:

1) Indikator Masukan (*Input*)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran ini. Indikator Masukan ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Ukuran ini berguna untuk memonitor jumlah sumber daya yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara, dan mendistribusikan produk, kegiatan dan atau pelayanan.

2) Indikator Keluaran (*output*)

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan dari suatu kegiatan dapat berupa fisik ataupun non fisik. Indikator ini dapat menjadi landasan guna menilai kinerja kemajuan suatu kegiatan apabila target kerjanya dikaitkan dengan sasaran-sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator ini harus sesuai dengan tugas pokok (tupoksi) unit organisasi yang bersangkutan. Indikator keluaran digunakan untuk memonitor seberapa banyak yang dapat dihasilkan atau disediakan, indikator keluaran diidentifikasi dengan banyaknya satuan hasil, produk atau tindakan dan sebagainya.

3) Indikator Hasil (*outcome*)

Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator hasil merupakan ukuran kinerja dari program dalam memenuhi sasarannya. Pencapaian sasaran dapat ditentukan dalam satu tahun anggaran, beberapa tahun anggaran, atau periode pemerintahan. Sasaran itu sendiri dituangkan dalam fungsi atau bidang pemerintahan seperti keamanan, kesehatan, atau peningkatan pendidikan. Ukuran hasil digunakan untuk menentukan seberapa jauh tujuan dari setiap fungsi utama yang dicapai dari *output* suatu aktivitas (produk atau jasa pelayanan), telah memenuhi keinginan masyarakat yang dituju.

4) Indikator Manfaat (*benefit*)

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terikat dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat ini tampak setelah beberapa waktu kemudian,

khususnya dalam jangka menengah, dan jangka panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai apabila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan tepat waktu), manfaat ini dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses.

5) Indikator Dampak (*impact*)

Indikator dampak adalah ukuran tingkat pengaruh social, ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umum lainnya, yang dimiliki oleh capaian kerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Maka penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi, konsultasi tentang indikator atau ukuran kinerja ataupun ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi

2.1.3 Kinerja Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi (Indra Bastian, 2001:25).

Menurut Hamdani Pasolong yang dikutip oleh Irhan Fahmi (2010:5) bahwa kinerja mempunyai beberapa elemen diantaranya:

- a. Hasil kerja yang dicapai secara individual atau secara institusi, yang berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau kelompok.

- b. Dalam melaksanakan tugas, lembaga diberikan wewenang dan tanggung jawab yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan kekuasaan untuk ditindak lanjuti sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik.
- c. Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, berarti melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
- d. Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral dan etika, artinya selain mengikuti aturan yang ditetapkan, tentu saja pekerjaan haruslah sesuai moral dan etika yang berlaku.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam UUD tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut Badrudin (2014:4) menyatakan bahwa pemerintah daerah beserta DPRD mempunyai kekuasaan dalam menyusun kebijakan-kebijakan untuk melancarkan interaksi ekonomi antar pelaku ekonomi daerah. Hakekat pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang ditunjukkan dalam tindakan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi suatu wilayah tersebut.

Menurut Kadarisman (2018:20) Kinerja Pemerintah Daerah merupakan suatu wujud dan bentuk penilaian kinerja pada suatu organisasi atau kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur/pegawai pemerintah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa prestasi kerja organisasi merupakan hasil dari kerja sama antara pegawai yang bersangkutan dengan organisasi dimana pegawai tersebut dapat mencapai prestasi kerja yang diinginkan. Prestasi kerja dicapai manakala kinerja pegawai disandarkan pada standar yang ditetapkan.

2.1.3.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja difokuskan untuk mengukur kinerja dari aparatur atau pegawai pemerintah. Pengukuran ini dianggap penting karena nantinya pemerintah wajib mempertanggungjawabkan hasil kerjanya terhadap publik/masyarakat. Dari pengukuran ini akan diketahui bahwa kinerja seseorang atau sekelompok pegawai tersebut sudah baik atau tidak. Proses pengukuran kinerja dijadikan masukan untuk perbaikan ataupun masukan terhadap peningkatan kualitas pelayanan organisasi di masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja berfungsi untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan. Pengukuran diperlukan untuk menilai tingkat besarnya terjadi penyimpangan antara kinerja actual dan kinerja yang diharapkan. Dengan mengetahui penyimpangan tersebut dapat dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja (Rezqiyah, 2017).

Mahsun (2006) menyebutkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) ialah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas; efisiensi

penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai berapa jauh pelanggan terpuaskan; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Jadi pengukuran kinerja ini dapat disimpulkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan atau strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi atau lembaga serta dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

2.1.3.3 Tujuan Pengukuran Kinerja

Menurut pendapat Mahmudi (2016) tujuan dilakukannya kinerja sektor publik adalah sebagai berikut:

1) Mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi

Untuk melihat apakah organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan atau menyimpang dari tujuan tersebut.

2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai

Pengukuran kinerja ini merupakan salah satu sarana untuk pembelajaran pegawai tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak, dan memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, atau pengetahuan yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik.

3) Memperbaiki kinerja periode berikutnya

Pengukuran kinerja saat ini dapat dijadikan dasar untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

4) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*

Dengan adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh *reward* begitu juga dengan pegawai yang berkinerja rendah akan memperoleh *punishment*.

5) Memotivasi pegawai dan menciptakan akuntabilitas publik

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas publik dalam bentuk laporan kinerja baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal.

2.1.3.4 Indikator Pengukuran Kinerja

Bastian (2016:267) menjelaskan bahwa indikator kinerja merupakan alat ukur yang dapat menggambarkan tentang pencapaian atau tujuan dalam sebuah organisasi sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Value For Money merupakan indikator untuk mengukur suatu kinerja serta informasi tentang anggaran yang digunakan atau dibelanjakan oleh organisasi pemerintah. Baik dan tidaknya kinerja dari sektor publik atau pemerintahan tidak bisa dinilai dari *output* yang dihasilkan saja tetapi harus memberikan juga pertimbangan ada *input*, dan *outcome* secara bersamaan.

Value For Money merupakan inti dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi harus *mempertimbangkan input, output, dan outcome* secara bersamaan. tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan *input, output, dan outcome* secara bersama-sama (Mardiasmo, 2018).

Permasalahan yang sering muncul adalah sulitnya mengukur output karena output yang dihasilkan pemerintah tidak selalu berupa output yang berwujud (*tangible output*), tetapi kebanyakan juga bersifat output tidak berwujud (*intangible output*). Ukuran kinerja pada dasarnya berbeda dengan indikator kinerja. Perbedaan antara ukuran kinerja dengan indikator kinerja adalah:

- 1) Ukuran kinerja, umumnya mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, misalnya: laporan keuangan pemerintah.
- 2) Indikator kinerja, mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja.

Value For Money adalah penilaian yang diberikan masyarakat terhadap kinerja sektor public melalui program yang dijalankannya sesuai dengan tingkat keberhasilan yang diperoleh sektor public (Riadi, 2020).

Mardiasmo (2018) membagi *Value For Money* menjadi dua indikator diantaranya yaitu:

- 1) Indikator Alokasi Biaya (Ekonomis dan Efisien)
- 2) Indikator Kualitas Pelayanan (Efektifitas)

Elemen pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik meliputi Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas. Tujuan yang dikehendaki masyarakat ini mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money* yaitu:

- 1) Ekonomis (Hemat)

Menurut Mahmudi (2016:21) Ekonomis merupakan penghematan anggaran dalam proses memperoleh input atau pemasukan dari kegiatan yang sedang berlangsung. Membandingkan tingkat realisasi anggaran belanja dengan target

anggaran belanja merupakan salah satu cara untuk mengukur tingkat ekonomis dari sebuah kegiatan.

Ekonomis disini mengukur sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif dalam pengadaan dan alokasi sumber daya. Dalam ekonomis ini terpaut sejauh apa lembaga pemerintah mengurangi sumber daya produksi sambil menghindari biaya yang tidak perlu. sebuah kegiatan yang dapat dikategorikan ekonomis asalkan bisa menghilangkan ataupun mengurangi pengeluaran yang kurang penting.

Pengukuran ekonomi ini memerlukan informasi anggaran pengeluaran dan realisasi anggaran, gunanya agar dapat mengetahui tingkat keekonomisan dari anggaran tersebut dan dapat dilihat pada konsep penganggaran yang dibuat oleh organisasi sektor publik.

2) Efisiensi (Berdaya Guna)

Menurut Mardiasmo (2018:132) efisiensi dapat dinilai melalui perbandingan antara *output* yang akan dihasilkan terhadap *input* yang akan digunakan (*cost of output*).

Menurut Mahmudi (2016:85) efisiensi merupakan suatu pengukuran yang digunakan dengan membandingkan biaya sesungguhnya dan biaya standar. Penggunaan sumber daya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan.

Efisiensi ini dihitung berdasarkan hasil efisiensi keluaran dan masukan. Semakin tinggi *output* dibandingkan *input* semakin meningkat pula efisiensi dari organisasi. *Output* adalah hasil diperoleh dari aktivitas, program, serta kebijakan.

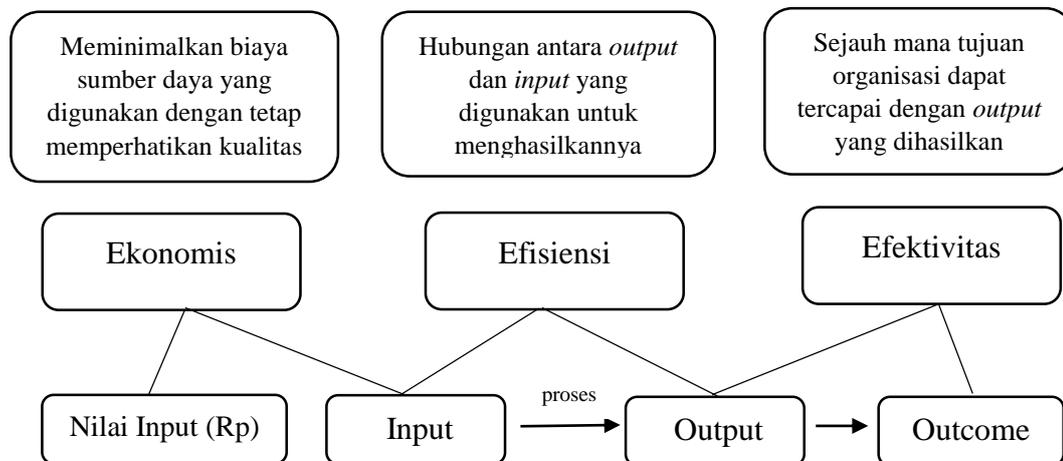
Sehingga pada penelitian ini *output* dimaksud ialah hasil yang ada pada aktivitas. *Input* diperbandingkan dengan *output* agar menetapkan tingkatan efisiensi merupakan tingkat dari angka adalah hasil yang diperoleh dari dibandingkannya anggaran serta realisasi anggarannya.

3) Efektivitas (Berhasil Guna)

Mahmudi (2016:21) mendefinisikan bahwa efektivitas adalah gambaran tentang hubungan keterkaitan antara *output* dengan tujuan, disaat *output* memberikan kontribusi yang cukup besar dalam sebuah organisasi terhadap sebuah pencapaian tujuan organisasi tersebut maka akan semakin efektif pula organisasi tersebut.

Ravianto (2014:367) juga mendefinisikan efektivitas merupakan sesuatu hal yang menjadi ujung dari tombak dalam mengukur baik tidaknya suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan. Suatu pekerjaan yang dilaksanakan dianggap efektif, apabila dikerjakan sesuai dengan konsep yang telah dirancang, baik dari segi waktu, biaya dan kualitasnya.

Efektivitas ini merupakan tolak ukur keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil memenuhi sasarannya, sehingga bisa dikatakan bahwa organisasi tersebut telah beroperasi secara efektif. Jadi efektivitas tidak menentukan mengenai berapa banyak biaya yang keluar selagi pencapaian tujuan tersebut. Tapi efektivitas melihat bagaimana organisasi tersebut sudah memenuhi tujuan yang diharapkan Secara sistematis *value for money* dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Mardiasmo (2018)

Gambar 2.2

Skema Value For Money

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menyimpulkan referensi dari beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran dan untuk membedakan dengan penelitian sebelumnya sehingga dapat membedakan keaslian dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian-penelitian yang mendukung sebagai berikut:

Dadang Suhendar (2016) meneliti “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Keberhasilan Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja APBD Kabupaten/Kota Se-Wilayah III Cirebon Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderator”. Variabel independen yang digunakan adalah *Good Governance*, dan Komitmen organisasi sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu Keberhasilan penetapan penganggaran berbasis kinerja APBD. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan cara membagikan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara simultan ataupun parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Implementasi penganggaran APBD berbasis kinerja.

Nisa Sabrina Yuliana (2018) melakukan penelitian berjudul “Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Bidang Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran”. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Prinsip-prinsip *Good Governance* sedangkan variabel dependennya yaitu Kinerja organisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, dan melakukan observasi serta wawancara sebagai alat pengumpul data. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam meningkatkan kinerja organisasi sudah berjalan dengan baik dan berpengaruh positif.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ana Muchlisa Rezeqiah (2017) dengan judul “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)”. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu anggaran berbasis kinerja dan variabel dependennya yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penyebaran kuesioner sebagai alat pengumpul data. Dengan analisis data menggunakan regresi linier sederhana. Hasil dari penelitiannya menunjukkan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

M Sandi Marta, dkk. (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran (Di Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kabupaten Bandung Barat)” Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja sedangkan variabel dependennya yaitu Efektivitas Pengendalian Anggaran. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dengan analisis data menggunakan Regresi Linear Berganda. Penelitian yang dilakukan oleh Marta, dkk menunjukkan hasil bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh secara simultan terhadap pengendalian anggaran.

M Fadhil Junery & Norhanisah (2019) meneliti “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bengkalis)”. Dengan variabel independen yaitu Anggaran Berbasis Kinerja dan variabel dependennya yaitu Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan penyebaran kuesioner sebagai alat pengumpul data. Hasil dari penelitian ini yaitu Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh sangat rendah terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah.

Febrina Astria Verasvera (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat)”. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Anggaran Berbasis Kinerja, dan variabel dependennya adalah Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah. Metode penelitian ini yaitu kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruh positif antara anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah pada Dinas Sosial provinsi Jawa Barat.

Indriana (2018) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”. Variabel independen dari penelitian ini yaitu pengaruh *Good Governance* dan variabel dependennya yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, dan menggunakan kuesioner sebagai sumber pengumpulan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa Secara simultan *Good Governance* berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Muhammad Aldi Ramadhan, & Hendratno (2023) dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada SKPD Kabupaten Deli Serdang)” Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Akuntabilitas Publik, sedangkan variabel dependennya yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Kuantitatif deskriptif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa Indikator variabel anggaran berbasis kinerja, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di SKPD Kabupaten Deli Serdang.

U'ah Ganda Fratiwi (2018) meneliti dengan judul “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur)”. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Anggaran Berbasis Kinerja sedangkan variabel dependennya yaitu Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Kuantitatif, dan menggunakan kuesioner sebagai sumber pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Partial Least Square*. Hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Dina Epriliani (2022) meneliti Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Penerapan *Good Governance* dan Disiplin Kerja sedangkan variabel dependennya yaitu Kinerja Pemerintahan Daerah. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai sumber pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara *Good Governance* dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

Ferina Anggraeni & Suji Abdullah Saleh (2020) dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). Variabel independen dalam penelitian ini Penerapan

Anggaran Berbasis Kinerja sedangkan variabel dependennya yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai sumber pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Bandung.

Muhammad Sya'roni, & Dini Widyawati (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya”. Variabel independen dalam penelitian ini Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja sedangkan variabel dependennya yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai sumber pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan hasil yang menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh positif dari Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya.

Fauziah (2021) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Pertanggungjawaban Belanja terhadap Kualitas Laporan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan.”. Variabel independen dalam penelitian ini Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Pertanggungjawaban Belanja sedangkan variabel dependennya yaitu Kualitas Laporan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP).

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survey dengan menggunakan kuesioner sebagai sumber pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Penerapan anggaran berbasis kinerja berdampak positif dan signifikan terhadap kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Nadira Hilmi Israr (2022) penelitiannya berjudul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Penerapan *Good Governance* Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Padang)”. Variabel independen dalam penelitian ini Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Komitmen Organisasi sedangkan variabel dependennya yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survey dengan menggunakan kuesioner sebagai sumber pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja dan penerapan *good governance* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Muhammad Yamin (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survei Pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan)”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengaruh Kompetensi Aparatur Dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja sedangkan variabel dependennya yaitu *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survey dengan menggunakan kuesioner sebagai sumber pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *path analysis*. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Kompetensi Aparatur dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Memiliki Pengaruh Yang Signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nurul Fathia (2017) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Kasus SKPD di Provinsi Riau)”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi sedangkan variabel dependennya yaitu *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif deskriptif dengan menggunakan kuesioner sebagai sumber pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear . Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Kompetensi Aparatur dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Memiliki Pengaruh Yang Signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laura Wahdatul (2016) meneliti “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan, sedangkan

variabel dependennya yaitu *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif deskriptif dengan menggunakan kuesioner sebagai sumber pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung.

Komang Budarsana (2016) juga melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng)”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Efektivitas Pengendalian Internal, sedangkan variabel dependennya yaitu *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif menggunakan kuesioner sebagai sumber pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Efektivitas Pengendalian Internal berpengaruh signifikan dan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja.

Lena Oktaviani, dkk (2023) meneliti dengan judul “Implementasi *Good Governance* dalam Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Cimahi Tengah”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Implementasi *Good Governance*

sedangkan variabel dependennya yaitu Kinerja Pegawai . Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif menggunakan kuesioner sebagai sumber pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Implementasi *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Cimahi Tengah.

Dewi kurniasari (2017) dengan penelitian berjudul “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran Di Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Anggaran Berbasis Kinerja, sedangkan variabel dependennya yaitu Efektivitas Pengendalian Anggaran. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif menggunakan kuesioner sebagai sumber pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh dari anggaran berbasis kinerja secara parsial dan simultan terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dadang Suhendar, 2016, Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Terhadap Keberhasilan Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja APBD Kabupaten/Kota Se-	Variabel Penerapan <i>Good Governance</i> (X_1) Anggaran Berbasis Kinerja (X_2)	Variabel Kinerja Pemerintah Daerah, Teknik analisis data: Regresi linear berganda	Baik secara simultan ataupun parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Implementasi penganggaran	Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi Vol. 2 No. 2 2016

	Wilayah III Cirebon Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderator	Metode Penelitian		APBD berbasis kinerja	
2	Nisa Sabrina Yuliana, 2018, Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Bidang Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran	Variabel Penerapan <i>Good Governance</i> (X_1) Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X_2), Metode penelitian: Observasi dan wawancara.	Implementasi prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam meningkatkan kinerja organisasi sudah berjalan dengan baik dan berpengaruh positif	Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol.6 No.4 2018
3	Ana Muchlisa Rezeqiah, 2017, Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)	Anggaran Berbasis Kinerja (X_2) Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	Variabel Penerapan <i>Good Governance</i> (X_1), Teknik Analisis: Regresi linear sederhana	Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Jurnal Akuntansi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang P-ISSN 2548-7253
4	M Sandi Marta, dkk. 2017, Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran Di Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat	Anggaran Berbasis Kinerja (X_2) Metode penelitian: Kuantitatif, Teknik Analisis: Regresi Linear Berganda	Variabel Penerapan <i>Good Governance</i> (X_1) dan Variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh secara simultan terhadap pengendalian anggaran	Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 2017
5	M Fadhil Junery & Norhanisah, 2019, Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bengkalis)	Anggaran Berbasis Kinerja (X_2) Kinerja Pemerintah Daerah (Y), Metode penelitian: Kuantitatif deskriptif dengan kuesioner	Variabel Penerapan <i>Good Governance</i> (X_1)	Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh sangat rendah terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah	E-Journal STIE Syariah Bengkalis Vol. 2 No. 1 2018

6.	Febrina Astria Verasvera, 2016, Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat)	Anggaran Berbasis Kinerja (X ₂) Kinerja Pemerintah Daerah (Y), Metode penelitian: Kuantitatif deskriptif dengan kuesioner	Variabel Penerapan <i>Good Governance</i> (X ₁).	Terdapat pengaruh positif antara anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah pada Dinas Sosial provinsi Jawa Barat	Jurnal Manajemen Maranatha Vol. 15 No. 2 2016
7	Indriana, 2018, Pengaruh <i>Good Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Variabel <i>Good Governance</i> (X ₁), Metode penelitian: Kuantitatif deskriptif dengan kuesioner	Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X ₂) dan Kinerja Pemerintah Daerah (Y), Teknik analisis: Regresi Linear sederhana	Secara simultan <i>Good Governance</i> berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol. 8 No. 1 2018
8.	Muhammad Aldi Ramadhan, & Hendratno, 2023, Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada SKPD Kabupaten Deli Serdang)	Anggaran Berbasis Kinerja (X ₂) Kinerja Pemerintah Daerah (Y), Metode penelitian: Kuantitatif deskriptif	Variabel Penerapan <i>Good Governance</i> (X ₁), Teknik analisis: Regresi Linear Berganda	Indikator variabel anggaran berbasis kinerja, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di SKPD Kabupaten Deli Serdang	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol. 5 No 9 (2023) P-ISSN: 2622-2191 E-ISSN : 2622-2205
9.	U'ah Ganda Fratiwi, 2018, Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur)	Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X ₂) Kinerja Pemerintah Daerah (Y), Metode penelitian: Kuantitatif dengan kuesioner	Variabel Penerapan <i>Good Governance</i> (X ₁), Teknik analisis: <i>Partial Least Square</i>	Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah Dinas Sosial Provinsi	Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman Vol. 3 No. 4 2018

				Kalimantan Timur	
10.	Dina Epriliani, 2022 Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru	Variabel Penerapan <i>Good Governance</i> (X_1), dan Kinerja Pemerintah Daerah (Y), Metode penelitian: Kuantitatif dengan kuesioner	Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X_2), Teknik analisis: Regresi Linear Berganda	Terdapat pengaruh secara simultan antara <i>Good Governance</i> dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru	Jurnal Ilmiah Kesatuan Vol. 10 No. 1 2022 pg. 79-90
11.	Ferina Anggraeni & Suji Abdullah Saleh, 2020, Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung)	Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X_2) Kinerja Pemerintah Daerah (Y), Metode penelitian: Kuantitatif deskriptif dengan kuesioner	Variabel Penerapan <i>Good Governance</i> (X_1), Teknik analisis: Regresi Linear sederhana	Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Bandung.	<i>Indonesian Accounting Research Journal</i> Vol. 1 No. 1 2020
12.	Muhammad Sya'roni, & Dini Widyawati, 2019, Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya	Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X_2) Kinerja Pemerintah Daerah (Y), Metode penelitian: Kuantitatif dengan kuesioner	Variabel Penerapan <i>Good Governance</i> (X_1), Teknik analisis: Regresi Linear Berganda	Terdapat pengaruh positif dari Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 8 No. 8 2019
13	Fauziah, 2021, Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Pertanggungjawaban Belanja terhadap Kualitas Laporan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan	Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X_2) Kinerja Pemerintah Daerah (Y), Metode penelitian: Kuantitatif survey dengan kuesioner	Variabel Penerapan <i>Good Governance</i> (X_1), Teknik analisis: Regresi linier berganda	Penerapan anggaran berbasis kinerja berdampak positif dan signifikan terhadap kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan Juripol Vol. 4 No. 1 2021
14	Nadira Hilmi Israr, 2022, Pengaruh	Variabel <i>Good</i>	Teknik analisis:	Penerapan anggaran	Jurnal Eksplorasi

	Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Penerapan <i>Good Governance</i> Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Padang)	<i>Governance</i> (X_1), Anggaran Berbasis Kinerja (X_2) Kinerja Pemerintah Daerah (Y), Metode penelitian: Teknik analisis: Kuantitatif dengan kuesioner	Regresi Linear Berganda	berbasis kinerja dan penerapan <i>good governance</i> berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Akuntansi (JEA) Vol. 4 No. 4 2022
15	Muhammad Yamin, 2021, Pengaruh Kompetensi Aparatur Dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survei Pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan)	Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X_2) Kinerja Pemerintah Daerah (Y), Metode penelitian: Kuantitatif survey dengan kuesioner, Teknik analisis: <i>Path Analysis</i>	Variabel Penerapan <i>Good Governance</i> (X_1),	Kompetensi Aparatur dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Memiliki Pengaruh Yang Signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Jurnal Ekonomi Al Iqtishad Vol. 12. No.2 2021
16	Nurul Fathia, 2017, Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Kasus SKPD di Provinsi Riau)	Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X_2) Kinerja Pemerintah Daerah (Y), Metode penelitian: Kuantitatif survey dengan kuesioner	Variabel <i>Good Governance</i> (X_1), Teknik Analisis Data: Regresi Linear	Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, penerapan anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan keuangan, dan pengendalian akuntansi secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Vol. 4 No. 1 2017
17	Laura Wahdatul, 2016, Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan	Variabel Anggaran Berbasis	Variabel <i>Good Governance</i> (Anggaran Berbasis Kinerja dan	E- Proceeding s of

	Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung	Kinerja (X_2), Metode penelitian: Kuantitatif deskriptif dengan kuesioner	X_1 , Teknik Analisis Data: Regresi Linear berganda	Sistem Pelaporan Keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung.	Manajemen Vol. 3 No.2 2016
18	Komang Budarsana, 2016, Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng)	Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X_2) Kinerja Pemerintah Daerah (Y), Metode penelitian: Kuantitatif dengan kuesioner	Variabel <i>Good Governance</i> (X_1), Teknik Analisis Data: Regresi Linear berganda	Secara parsial dan simultan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Efektivitas Pengendalian Internal berpengaruh signifikan dan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha Vol. 4 No.1 2016
19	Lena Oktaviani, dkk. 2023, Implementasi <i>Good Governance</i> dalam Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Cimahi Tengah	Variabel Penerapan <i>Good Governance</i> (X_1) Kinerja Pemerintah Daerah (Y), Metode penelitian: Kuantitatif	Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X_2), Teknik Analisis Data: Regresi Linear berganda	Implementasi <i>Good Governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Cimahi Tengah	Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Vol. 10 No. 2 2023
20	Dewi kurniasari, 2017, Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran Di Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat	Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X_2), Metode penelitian: Kuantitatif dengan kuesioner	Variabel <i>Good Governance</i> (X_1), dan Kinerja Pemerintah Daerah (Y), Teknik Analisis Data: Regresi Linear berganda	Analisis berbasis kinerja berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap efektivitas pengendalian anggaran	Jurnal Ilmu Administrasi Publik Unmer Vol. 2 No. 2 2017

Jihan Fadhilah (2024) 203403186

Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis).

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik pemerintah menciptakan pemerintahan yang bersih, dan berwibawa atau yang biasa disebut *Good Governance*. Sebagai pelaku dalam pelaksanaan *Good Governance* ini pemerintah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang transparan dan akurat. Sesuai dengan era reformasi ini, dalam penerapan *Good Governance* dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, maupun mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan *good governance* adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan daerah bagi publik sangat penting dilakukan pemerintah daerah demi tercapainya kepuasan kerja pada masyarakat (Neneng, 2016:2).

U'ah Ganda Fratiwi (2018) menyebutkan bahwa *teori stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi sektor publik, seperti organisasi pemerintahan. yang sejak awal perkembangannya akuntansi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi informasi bagi hubungan antara *steward* dengan *principals*. Teori *stewardship* diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku, perilaku manusia (*behavior*), pola manusia (*model of man*), mekanisme psikologis (motivasi, identifikasi dan kekuasaan) dalam sebuah organisasi yang mempraktikkan kepemimpinan sebagai aspek yang memainkan peranan penting bagi sebuah pencapaian tujuan. Dalam teori *stewardship* dijelaskan bahwa kinerja

organisasi yang baik adalah organisasi yang didalamnya terdapat kesamaan tujuan, sehingga terhindar dari konflik-konflik internal. Teori ini menyebutkan bahwa kesuksesan kinerja sebuah organisasi dapat dilihat dari kesuksesan organisasinya. Ketika suatu agent organisasi mempunyai tujuan dan kepentingan yang sudah berjalan berdampingan dan lurus dengan apa yang diinginkan oleh principal maka konflik-konflik yang akan mengganggu tercapainya tujuan tersebut dapat dihindari. Ketika konflik dapat dihindari dan tujuan dari organisasi tercapai, menunjukkan bahwa organisasi ini mempunyai tata kelola yang baik (*good governance*). Akuntansi sebagai penggerak informasi keuangan (*driver*) berjalannya transaksi kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik.

Moenek (2019) mengartikan *Good Governance* sebagai pengelolaan yang baik. Dimaksudkan mengikuti kaidah-kaidah tertentu yang sesuai dengan prinsip *Good Governance*. Sebagian mengartikan *Good Governance* sebagai penerimah konkret demokrasi dengan meniscayakan adanya *civic culture* sebagai penopang sustainabilitas demokrasi tersebut.

Menurut Hasibuan (2008:45) menyatakan bahwa *Good Governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dimana pola dan sikap tindak pelaku-pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu sehingga menciptakan negara (pemerintah) yang kuat, pasar yang kompetitif dan *civil society* yang mandiri.

Indikator *Good Governance* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu indikator yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2013:289) dimana *Good*

Governance dapat diukur dengan adanya 4 (empat) prinsip diantaranya yaitu, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, dan Supermasi Hukum.

Pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah sebelumnya telah diteliti oleh Dadang Suhendar (2016). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Implementasi penganggaran APBD berbasis kinerja.

Dalam penerapan *Good Governance*, untuk menciptakan Kinerja Pemerintah daerah yang baik adalah terlaksananya Anggaran Berbasis Kinerja yang baik. Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik juga berpengaruh terhadap pengelolaan dan penyusunan anggaran pemerintah.

Hal ini didukung oleh Liza (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa untuk mewujudkan *good governance* seperti transparansi, dan akuntabilitas dan prinsip lainnya dalam hal keputusan alokasi sumber daya maka perlu dilakukan perancangan anggaran berbasis kinerja.

Penelitian ini sejalan dengan Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan *good governance* maka anggaran berbasis kinerja diperlukan sebagai salah satu bentuk dari reformasi penganggaran.

Sony Yuwono, dkk (2005:34) menyatakan bahwa anggaran kinerja adalah sistem anggaran yang lebih menekankan pada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal.

Indra Bastian (2001:334) menyebutkan *performance budgeting* merupakan suatu sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi. *performance budgeting*

mengalokasikan sumber daya ke program, bukan ke unit organisasi semata dan memakai pengukuran *output* (*output measurement*) sebagai indikator kinerja organisasi.

Elemen indikator kinerja menurut Indra Bastian (2001:337) diantaranya adalah Indikator masukan (*input*), Indikator keluaran (*output*), Indikator hasil (*outcome*), Indikator manfaat (*benefit*), dan Indikator dampak (*impact*).

Hubungan antara Anggaran berbasis kinerja dan good governance sebelumnya telah diteliti oleh Liza (2016) yang menyatakan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance*.

Terlaksananya penganggaran berbasis kinerja dalam suatu organisasi merupakan sebuah bentuk dari penerapan *good governance*. Anggaran yang terealisasi dengan baik dalam prosesnya sendiri tidak terlepas dari adanya prinsip *Good Governance*. Dalam Anggaran pada pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai perencanaan, alat pengendalian serta sebagai instrument akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Dengan ditetapkannya anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas serta akuntabilitas instansi dalam pengelolaan anggaran.

Indra Bastian (2001:25) menjelaskan bahwa kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.

Riadi (2020) menjelaskan *Value For Money* adalah penilaian yang diberikan masyarakat terhadap kinerja sektor publik melalui program yang dijalankannya sesuai dengan tingkat keberhasilan yang diperoleh sektor publik.

Menurut Mardiasmo (2018) menyebutkan indikator dalam pengukuran kinerja menurut *Value For Money* diantaranya Indikator Alokasi Biaya (Ekonomis dan Efisien), dan Indikator Kualitas Pelayanan (Efektifitas).

Adanya hubungan antara *good governance* terhadap kinerja pemerintah didukung oleh penelitian Indriana (2018) yang menyatakan bahwa secara simultan *good governance* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini diteliti juga oleh Nisa Sabrina Yuliana (2018). Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* berpengaruh positif terhadap Kinerja pemerintah.

Dina Epriliani (2022) juga melakukan penelitian yang sama dengan menyatakan bahwa *good governance* mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemerintahan. Penelitian ini sejalan dengan Lena Oktaviani dkk (2023) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Good Governance* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pegawai.

Berdasarkan banyaknya penelitian mengenai penerapan *Good Governance*. Dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah dimana pemerintah daerah yang melaksanakan prinsip *Good Governance* dengan baik dan tepat akan memiliki kinerja yang baik. Dan terdapat hubungan antar keduanya karena *Good Governance* memiliki nilai-nilai yang dapat

membuat pemerintah bekerja lebih efektif dalam mewujudkan kesejahteraan organisasi maupun publik.

Sedangkan hubungan antara Anggaran berbasis kinerja dengan kinerja pemerintah sebelumnya telah diteliti oleh U'ah Ganda Fratiwi (2018). Penelitiannya menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja.

Penelitian ini juga telah diteliti oleh Ana Muchlisa Rezeqiah (2017) dengan menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

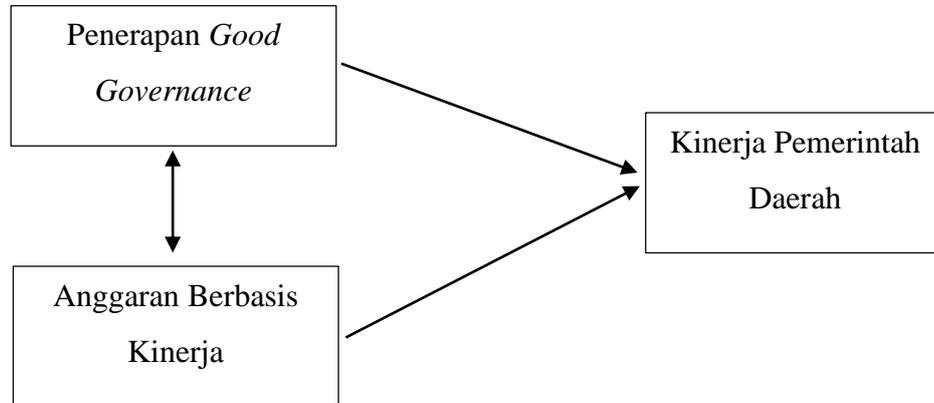
Hail penelitian ini sejalan Ferina Anggraeni (2020) dan penelitian Muhammad Yamin (2021) yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan dari penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah.

Terdapat hubungan antara anggaran berbasis kinerja dengan kinerja pemerintah karena dalam proses pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, penganggaran, pengalokasian, maupun pelaksanaan program selalu berkaitan dengan ukuran indikator kinerja dengan meningkatkan efisiensinya. Anggaran dengan pendekatan kinerja ini disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan dalam anggaran tradisional, maka anggaran berbasis kinerja ini merupakan reformasi pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan anggaran. Dengan menggunakan konsep *Value For Money* diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas dalam sektor publik dan kinerja sektor publik. Yang artinya reformasi anggaran ini akan memberikan dampak untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan

didukung oleh terciptanya instansi pemerintahan dengan kinerja yang efektif, ekonomis, dan efisien. Indikator kinerja juga diperlukan untuk mendukung sistem penganggaran berbasis kinerja dalam penentuan sasaran (*targets*) yang jelas agar kinerja dapat diukur untuk mencapai *output* yang ditetapkan (Kurrohman, 2013).

Oleh karena itu terdapat keterkaitan antara penerapan *good governance* dan anggaran berbasis kinerja yang berpengaruh positif secara simultan dan parsial terhadap kinerja pemerintah daerah, didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Dadang Suhendar (2016) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Keberhasilan Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja APBD Kabupaten/Kota Se-Wilayah III Cirebon”.

Dari uraian di atas dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran Teoritis

2.3 Hipotesis

Sugiyono (2018:63) mendefinisikan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara,

karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan hasil dari penelitian terdahulu serta mempelajari data-data yang ada maka penulis membuat suatu hipotesis yaitu:

H₁ = Penerapan *Good Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

H₂ = Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

H₃ = Penerapan *Good Governance* dan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.